



Wagub Tegaskan Transparansi dan Sinergi

APBD 2024 Disahkan

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Balairungsari,

Gedung DPRD Kalbar, Senin (28/7).

Paripurna tersebut mencakup penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan Badan Anggaran, persetujuan DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban APBD, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.

Krisantus menyampaikan apresiasi atas kontribusi DPRD dalam proses pembahasan, serta menyebut masukan dan catatan yang diberikan menjadi dasar penting untuk perbaikan tata kelola anggaran di masa mendatang. "Informasi keuangan daerah yang akurat dan

transparan akan menjadi pijakan penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan bertanggung jawab. Ini bagian dari upaya kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang

berkualitas," ujarnya.

Mengacu pada Pasal 195 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui bersama akan segera disampaikan ke Kementerian



ADPIM PEMPROV KALBAR

Dalam Negeri untuk evaluasi dalam waktu maksimal empat hari sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Krisantus juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas peran aktif dan pemikiran konstruktif mereka selama proses pembahasan dokumen

SERAHKAN: Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan saat menyerahkan pandangan akhir Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar, Senin (28/7).

pertanggungjawaban APBD 2024. "Saya ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalimantan Barat," ucapnya.

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dalam mengawal pelaksanaan APBD agar senantiasa selaras dengan regulasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. "Kami mohon dukungan berkelanjutan dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Semoga implementasi APBD ke depan berjalan optimal dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Kalbar," tutupnya. (mse)